

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KARIMUN

Darwis<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Fitri Kurnia Ningsih<sup>3</sup>  
rafizalumrah@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### Abstract

*One of the public problems in Indonesia, especially in the field of Social Welfare at this time is the Problem of Handling Street Children. The purpose of this research is to look at the implementation of policies on the prevention of street children, homeless people and beggars in Karimun Regency and to see the supporting and inhibiting factors in the implementation of policies on handling street children, homeless people and beggars. The informants consisted of the Regent, Social Head, Stok PP, Community and street children. Research using descriptive techniques with a qualitative approach. The results of the study can be seen in the indicators Size and policy objectives in tackling street children in Karimun must be considered the application of the policies made by the regional government in solving a problem that arises in the community, whether the size and objectives of the policy itself have clear objectives or are still gray. As in its implementation. Indicator Characteristics of implementing agents As Implementers of a public policy that seeks to create order and peace of society, change human behavior and behavior, and create a balance, harmony and harmony between the interests of individuals and society. The Social Service resource indicator itself is relatively lacking. In terms of human resources there are only 33 people consisting of 6 members of the municipal police, 6 police and 21 people. Communication and coordination indicators of the Social Service with those who could actually be involved are also lacking, it is evident that only the BNN has an active role in conducting rehabilitation, even though the Social Service itself recognizes that they lack space to provide guidance. The Social, Economic and Political Environmental Indicators of the researchers found that there are still less active communities in supporting the appeals for the application of this policy, it is evident that there are still many people who actually give money to children and sprawl on the grounds of pity and so they quickly leave and do not interfere. Conclusion The implementation of policies for fostering street children, homeless people and beggars has not been achieved optimally because budget allocations in dealing with social problems are still limited, because facilities and infrastructure are still limited*

*Keywords: Implementation, Management Policy, street children.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

## I. Pendahuluan

Salah satu yang menjadi permasalahan Publik di Indonesia Khususnya dibidang Kesejahteraan Sosial saat ini adalah Masalah Penanggulangan Anak Jalanan. Permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang serius bagi pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikarenakan kehadiran serta kegiatan anak jalanan dalam Kehidupan Sosial Kita sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dianggap kegiatan-kegiatan mereka mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Bertambah nya jumlah Anak jalanan di Kabupaten Karimun saat ini tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat seperti keresahan dan kenyamanan masyarakat setempat, tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat lokal, dampak dari kegiatan anak jalanan tentunya berpengaruh terhadap wisatawan yang sedang berkunjung di Kabupaten Karimun.

**Tabel. 1**  
Data Penanggulangan Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Anak	Ditangani oleh	Penyelesaian
2017	16 Orang	Satpol-PP, Dinas sosial, dan Kepolisian	Pembinaan-Peringatan
2018	22 Orang	Satpol-PP, Dinas sosial, dan Kepolisian	Pendataan-Perjanjian-dikembalikan
2019	20 Orang	Satpol-PP, Dinas sosial, dan Dinas Kesehatan	Pendataan-perjanjian-pengobatan-dikembalikan

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

Bertambah nya jumlah Anak jalanan di Kabupaten Karimun saat ini tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat seperti keresahan dan kenyamanan masyarakat setempat, tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat lokal, dampak dari kegiatan anak jalanan tentunya berpengaruh terhadap wisatawan yang sedang berkunjung di Kabupaten Karimun. Untuk menertibkan sejumlah anak jalanan dan pengemis tersebut, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun rutin melakukan pengawasan di tempat yang biasa ditongkrong oleh mereka. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Syahrudin mengatakan ada beberapa tempat yang dilakukan pemantauan terhadap mereka, karena dijadikan tempat berkumpul anak jalanan dan dijadikan tempat untuk mengemis atau meminta-minta. Terkait Permasalahan Sosial Penanggulangan Anak Jalanan ini, pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telahpun memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 dengan isinya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang dijelaskan dalam Point K, kemudian diperjelas dalam Rencana Strategis dinas sosial kabupaten karimun tahun periode 2016-2021 Peratuan inilah yang mendasari pemerintah Kabupaten Karimun untuk meminimalisir sebab akibat dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

**Tabel. 2**  
**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten**  
**Karimun**

No	Kategori	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah		Kenaikan
				2011	2016	Penurunan
1.	Penduduk Miskin	Masyarakat Miskin dengan status kesejahteraan	KK	9.647	14.293	4.646
		Sumber : BDT 2015 TNP2K	Jiwa	40.439	51.983	11.544
		Masyarakat Miskin (Pusdatin Kemsos RI)	KK	9.647	7.823	1.828
			Jiwa	40.439	32.794	7.645
		Masyarakat Miskin (BPS 2015)	KK	-	14.263	-
			Jiwa	-	57.053	-
2.	Masyarakat Hukum Adat Terpencil	Keluarga Komunitas Adat Terpencil	KK	192	102	90
3.	Penduduk Terlantar	Balita terlantar (usia 5 Tahun kebawah)	Jiwa	-	1	1
		Anak Terlantar (usia 6-18 Tahun)	Jiwa	453	417	36
		Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	3.022	2.957	65
4.	Penduduk Penyandang Disabilitas	Anak dengan Disabilitas	Jiwa	73	89	16
		Penyandang Disabilitas	Jiwa	547	875	328
5.	Penduduk Korban Bencana	Korban Bencana Alam	KK	68	163	95
		Korban Bencana Sosial	KK	-	6	-
6.	Penduduk miskin tidak berdomisili tetap	Gelandangan	Orang	-	-	-
		Pengemis	Orang	68	87	19
		Anak Jalanan	Orang	-	-	-

7.	Penduduk Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi	Anak yang menjadi korban	Orang	-	-	-
		tindak kekerasan				
		Tunasusila	Orang	463	463	-
		Korban Trafficking	Orang	-	-	-
		Pekerja Migran bermasalah	Orang	-	-	-
8.	Penduduk Marjinal	Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	n/a	65	65
		Orang dengan HIV/AIDs	Orang	170	105	-
		Kelompok Minoritas	Orang	n/a	70	70
		BWBLP	Orang	n/a	11	11
		Korban NAFZA	Orang	n/a	47	47

Sumber : Renstra Dinsos 2016-2021

Melihat Fenomena yang terjadi disepanjang tahun tentang terkait anak jalan an dikabupaten karimun serta menimbulkan akibat keresahan bagi masyarakat membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi Program kebijakan penanggulangan anak jalanan di kabupaten karimun.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun. Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan data skunder. Adapun yang menjadi penelitian dalam informen ini sebanyak 8 orang.

## III. Hasil dan Pembahasan

### HASIL

Hasil penelitian yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karimun sudah terbangun model-model kebijakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun terkait kendala dilapanagn hanya saja masih terkendala di anggaran dan fasilitas pendukung.

### PEMBAHASAN

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran seperti apa implemenasi kebijakan Program pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kabupaten Karimun. Maka dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147), yang terdiri dari 6 Indikator yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi & aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan adalah proses dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Daerah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, apakah ukuran dan tujuan daripada kebijakan itu sendiri sudah jelas tujuannya atau masih abu-abu dalam pelaksanaannya.

Ukuran dan Tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

Jalanan, yaitu meliputi mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures) yaitu pengaturan yang mengatur tata cara kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan kebijakan program penanggulangan anak jalanan. Mungkin yang saya tau jumlah anak jalanan yang di bina di suatu tempat pembinaan seperti panti asuhan atau rumah singgah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang berjumlah 15 orang, mereka dibina selama 1 minggu atau 7 hari, dengan binaan secara mental dan kerohanian.

Peneliti menyimpulkan bahwa keresahan yang di timbulkan oleh anak jalanan yang melakukan kegiatan kegiatan negative benar telah meresahkan dan mengganggu masyarakat yang lain. Namun tidak semua dari mereka yang identic dengan kriminal dan perilaku menyimpang lainnya. Ada juga yang hanya sekedar mengamen untuk makan dan bertahan hidup.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu maksud yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup dan memadai, implementasi suatu kebijakan akan terganggu dan menjadi agak sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah cukup dan memadai sesuai dengan apa yang tertera di dalam peraturan. Selain itu, pihak pembuat dan pelaksana kebijakan harus menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai sumber daya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Manusia, merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara optimal. Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal.
- b) Finansial, merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dengan manusia. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana mealui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan tersebut. Untuk memperdalam sumber daya finansial dari Dinas Sosial, maka peneliti mewawancarai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- c) Waktu, Waktu merupakan sumber daya terakhir yang sama pentingnya dengan sumber daya yang sebelumnya. Waktu akan mempengaruhi tingkat kesulitan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur denga persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, waktu juga berbicara mengenai jam kerja pegawai apakah sesuai atau justru melampaui batas.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Setiap Para Pelaksana Kebijakan pasti memiliki Karakteristik Sendiri-sendiri, mulai dari struktur birokrasi, norma-norma yang ada dalam dinas yang terkait dan juga pada pola

hubungan dalam dinas yang akan sangat mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di kabupaten Karimun.

Perda no.3 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah kabupaten karimun yang mengatur tentang pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :

- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, merubah perilaku dan tingkah laku manusia, serta mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat perda ini melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya.

#### 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006):”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadi. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

#### 5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam setiap implementasi kebijakan, diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai elemen yang terkait. Walaupun ada satu elemen yang menjadi tumpuan atau pelaksana utama, tapi tentu akan membutuhkan elemen lain supaya tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Adanya elemen-elemen yang saling membantu untuk pengimplementasian sebuah kebijakan tidaklah cukup apabila koordinasi diantara organisasi yang terlibat tidak maksimal.

Komunikasi antarorganisasi harus terjalin dengan baik apabila sebuah kebijakan ingin terimplementasikan dengan optimal. Aktivitas yang dilakukan dalam mengimplementasikan

kebijakan harus dilakukan secara bersama-sama agar tingkat hambatan dan kesulitan saat proses implementasi semakin kecil.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dan tidak kalah penting adalah lingkungan eksternal yang ada dalam penerapan suatu kebijakan. Lingkungan eksternal memang membawa pengaruh dalam implementasi kebijakan besar maupun kecil. Apabila lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi faktor penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kekondusifan lingkungan eksternal harus pula diperhatikan agar pengimplementasian kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan pembinaan anjal dan gepeng, lingkungan eksternal yang paling dekat adalah masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat dapat mengambil andil dalam pengimplementasian perda ini dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penerapan kebijakan ini.

### IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum ada yang dapat tercapai secara maksimal dikarenakan alokasi anggaran dalam mengatasi permasalahan sosial masih terbatas, karena sarana dan prasarana masih terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan perindikator berikut ini :

#### 1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam menanggulangi anak jalanan di karimun harus diperhatikan penerapan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Daerah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, apakah ukuran dan tujuan daripada kebijakan itu sendiri sudah jelas tujuannya atau masih abu-abu dalam pelaksanaannya.

#### 2. Sumber Daya

Sumber Daya dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 33 orang yang terdiri dari 6 anggota satpol pp, 6 polisi dan 21 orang dari Dinas Sosial padahal kebijakan ini diterapkan di seluruh Kabupaten Karimun yang memiliki 12 kecamatan. Kemudian untuk satpol pp yang bertugas juga rata-rata sudah agak tua sehingga patroli yang dilakukan setiap hari kurang efektif, apalagi jika terjadi pengejaran terhadap anjal maupun gepeng yang berusaha kabur karena takut untuk dibawa, biasanya hanya satu/dua orang yang bisa mengejar karena yang lainnya sudah tidak terlalu kuat lari.

#### 3. Karakteristik agen pelaksana

Sebagai Pelaksana dari sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, merubah perilaku dan tingkah laku manusia, serta mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat diharapkan kedepannya para pelaksana agar bisa lebih dekat menggali dan memasuki kehidupan mereka dijalan.

#### 4. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

#### 5. Komunikasi dan koordinasi

Komunikasi Dinas Sosial dengan pihak yang sebetulnya dapat terlibat juga masih kurang, terbukti yang masih berperan aktif melakukan rehabilitasi hanya BNN padahal Dinas Sosial sendiri mengakui bahwa mereka kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan karena tempat yang Dinas Sosial yaitu RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) tidak terlalu besar sehingga tidak bisa menampung terlalu banyak anjal dan gepeng. Sama halnya dengan Masyarakat, dan pemerintah di kecamatan, komunikasi antara kecamatan dengan Dinas Sosial pun masih kurang.

#### 6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan Politik

Peneliti menemukan masih adanya masyarakat kurang berperan aktif dalam mendukung Himabauan-himbauan penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anjal dan gepeng dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Padahal sudah jelas ada larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap anjal dan gepeng di jalanan.

### V. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agus, Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta
- Ali, Faried, & Andi Syamsu Alama. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*, PT Reflika Aditama: Bandung
- Ali, Marpuji, dkk. 1990. *Gelandangan di Kertasura*. Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah: Surakarta. Dwijowijoto,
- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.



- Emzir. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Guntur Setiawan. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. Anak-Anak Yang Dilanggar Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Lutfansah Mediatama: Surabaya
- Nurdin, Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bintang Pustaka: Yogyakarta.
- Said, Zainal Abidin. 2012. Kebijakan Publik. Penerbit Salemba Humanika: Jakarta.
- Sugiono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan obor Indonesia: Jakarta
- Syamsu Alam, Andidan Ali, Fareid. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama: Yogyakarta.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Media Presindo: Yogyakarta.

## **Dokumen**

- Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Perda No 03 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah kabupaten karimun.
- Renstra Dinsos kabupaten karimun Tahun Periode 2016-2021

## **VI. Ucapan Terimakasih**

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji dan syukur penulis hadirkan kehadiran Allah Subhannahuwata'ala karena berkat izin dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun".

Skripsi ini membahas, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan anak jalanan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Penulis menyadari, tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, kepada yang terhormat :

1. Bapak Bapak Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang,
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang

3. Bapak Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
4. Bapak Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan pengarahan-pengarahan, masukam-masukan, dan saran-saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, S. Sos., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan pengarahan-pengarahan, masukam-masukan, dan saransaran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta staf-staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
7. Untuk teman-temanku, Siti Zariza, Ery Kusnadi, Bowo dan CS yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu adik-adik Kusuma Kepri yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis pada akhirnya dapat untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis pada akhirnya dapat untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga rekan-rekan segera menyusul.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa, penulis pada skripsi ini masih jauh dari pada kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan menghargai sekali adanya kritikan maupun bimbingan yang bermanfaat bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Aamin.